



THE URGENCY TO REGULATE SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA SPECIAL CRIMINAL LAW

By:

Meyvia Winda Avista¹, Sri Wiyanti Eddyono²

ABSTRACT

The purpose of this Legal Research is to find out the urgency to regulate sexual violence in Indonesia Special Criminal Law. This legal research is also aimed to find out what are the obstacles in enacting the law concerning sexual violence and the development of protection mechanism included in the bill of sexual violence.

This research is a normative empirical research, where this research is a combination of library and field research. The literature uses theoretical references and related regulation namely Indonesian Criminal Code, Bill on the Elimination of Sexual Violence, Indonesian Bill of Criminal Code, Criminal Procedural Code, Law No. 23 of 2004 regarding The Elimination of Domestic Violence, Law No. 21 of 2007 regarding The Elimination of Trafficking on Person, and Law No. 35 of 2014 regarding Child Protection. While field research is conducted to acquire data on the obstacles to enact the Bill on The Elimination of Sexual Violence and its development to protect victim of Sexual Violence.

The result of the first research question of this legal research is that the obstacles in enacting the Bill on The Elimination of Sexual Violence is due to the importance in the basis of Indonesian Bill of Criminal Code regulating Bill on the Elimination of Sexual Violence, the patriarchy culture and the debate on the formulation of the Bill are become the obstacles found in the field. As for the second research question, the development of the protection mechanism included in the Bill on The Elimination of Sexual Violence are including six important elements that is very important to be regulated under the Bill on The Elimination of Sexual Violence.

Key Words: Bill on The Elimination of Sexual Violence, Development Protection Mechanism, Obstacles in the enactment of Bill on Elimination of Sexual Violence.

¹ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2015).

² Lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.



URGENSI UNTUK MEREGULASI UNDANG- UNDANG KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS INDONESIA

Oleh:

Meyvia Winda Avista³, Sri Wiyanti Eddyono⁴

INTISARI

Tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui seberapa mendesaknya untuk meregulasi Undang-Undang Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Khusus Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam memberlakukan undang-undang terkait kekerasan seksual dan pengembangan mekanisme perlindungan untuk korban kekerasan seksual yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative empiris, dimana penelitian ini adalah gabungan dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan menggunakan rujukan teori dan peraturan terkait, yakni Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Perdagangan Orang dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data mengenai hambatan di lapangan dalam memberlakukan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual dan mekanisme pengembangan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Hasil dari rumusan masalah pertama dari penelitian hukum ini adalah hambatan dalam memberlakukan Rancangan Undang-Undang Kekerasan seksual karena perlunya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar formulasi Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual, budaya patriarki dan perdebatan dalam formulasi Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual menjadi hambatan di lapangan. Sedangkan, untuk rumusan masalah yang kedua pengembangan mekanisme perlindungan korban kekerasan seksual meliputi enam elemen penting yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: *Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual, Pengembangan Mekanisme Perlindungan Korban, Hambatan dalam memberlakukan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual.*

³ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

⁴ Dosen Department Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.